

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 13 Juli, FH Universitas Brawijaya, Malang, 2002
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1997
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002*, Faculty of Law the University of Melbourne, Australia, 2005
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Di Era Transisi Demokrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- E.D. Damanik, *Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi, Dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, UI Press, Jakarta, 1985
- Efriza dan Syafuan Rozi, *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad hingga DPD Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Herman Soewardi, *Koperasi Suatu Kumpulan Makalah*, Ikopin, Bandung, 1989

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, 1996
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1985
- Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995
- Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010

- Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Dimasa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- RM.A.B Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 Memuat Salinan Dokumen Otentik*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial*, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008
- Sri Edi Swarsono, *Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 27 Desember 2007
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1976
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga2 Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1977
- Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Dari pada Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IV/MPRS/1963 Tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Haluan Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIV/MPRS/1967 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

### **C. WEBSITE**

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/11/21112521/PDIP.Siap.Usulka.n.Amandemen.UUD.45.untuk.Kembalikan.GBHN>

<https://ngada.org/maklumatx-1945.htm>

<https://www.youtube.com/watch?v=B-tCj72RRq4>

<https://www.youtube.com/watch?v=pxVRJSmXLu0>

<https://www.youtube.com/watch?v=IIFHkxwLDNs>

#### **D. JURNAL**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, *Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Volume 17 Nomor 3, September 2017

Jurnal Penelitian Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, FH Universitas Pasundan, Bandung, 2012

Jurnal Penelitian Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, FH Universitas Islam Bandung, Bandung, 2012

#### **E. Artikel**

Saldi Isra, *Wacana Menghidupkan GBHN*, Kompas, 12 Januari 2016

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, *Menolak GBHN Menolak Masa Lalu*, Jakarta 19 Januari 2016

Ravik Karsidi, *GBHN untuk Kesejahteraan*, Kompas, 21 Januari 2016

Basis Susilo, *Urgensi GBHN di Era Reformasi*, Kompas, 23 Januari 2016

Fatchur Rochman, *Pemberlakuan Kembali GBHN*, 21 Januari 2016